

= RENPROJA =

**Rencana
Program Kerja
Jangka Menengah
2020-2024**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA**

**Jln. Garuda No. 23 Sumbawa Besar
Telp. (0371-2620594)**

KATA PENGANTAR

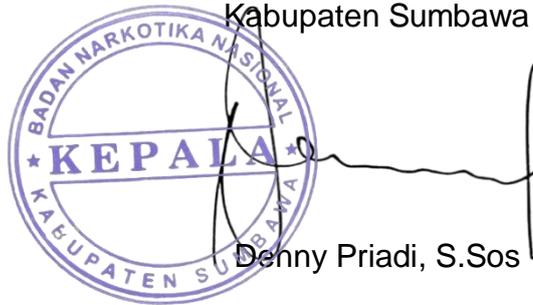
Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024 disusun dalam rangka tertib administrasi dan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renproja BNN Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024 memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta rencana sumber pembiayaannya. Penyusunan renproja BNN Kabupaten Sumbawa merupakan hasil sinkronisasi dengan Rencana strategis BNN tahun 2020-2024 yang memiliki nilai strategis dalam memperkuat kapasitas dan infrastruktur BNN untuk menghadapi dinamika ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Penyusunan dokumen renproja ini telah melalui berbagai macam diskusi dan masukan dari masing-masing bidang yang ada di BNN Kabupaten Sumbawa. Akan tetapi tentu saja masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dari dokumen ini baik dari sisi pengumpulan data, proses penyusunan maupun dalam hal penyajian. Kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas dokumen di masa yang akan datang.

Demikian Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024 kami susun. Semoga bermanfaat bagi peningkatan dan penyempurnaan kinerja instansi pemerintah, selanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sumbawa



Denny Priadi, S.Sos

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Potensi dan Permasalahan	21
BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL	24
A. Tujuan Organisasi	24
B. Arah Kebijakan dan Strategi Operasional	25
BAB III RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN	28
A. Rencana Kinerja.....	28
B. Rencana Kebutuhan Pendanaan	32
BAB IV PENUTUP	33
Lampiran 1 Matrik Rencana Kinerja BNNK SUMBAWA Tahun 2020-2024	34
Lampiran 2 Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan BNNK SUMBAWA Tahun 2020-2024	36
Lampiran 3 Matrik Output dan Rencana Komponen/Sub Komponen BNNK SUMBAWA Tahun 2020-2024	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Gambaran kondisi umum, potensi, dan permasalahan pembangunan P4GN dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program periode sebelumnya, kondisi lingkungan strategis, dan perkembangan baru lainnya. Potensi dan permasalahan pembangunan P4GN akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi BNN Kabupaten Sumbawa pada periode 2020-2024.

Kabupaten Sumbawa merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki kondisi geografis yang strategis untuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Apalagi didukung dengan sektor pariwisata yang terus berkembang dan penduduk yang didominasi oleh usia kerja. Faktor tersebut mendorong peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sumbawa terus meningkat seiring peningkatan kasus narkoba secara nasional. Kondisi tersebut juga mendorong tingginya angka kriminalitas di Kabupaten Sumbawa.

BNN Kabupaten Sumbawa melakukan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Seksi Rehabilitasi, dan Seksi Pemberantasan. Melalui Seksi tersebut BNN bersinergi dengan seluruh elemen komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Seksi Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat (P2M) melakukan kegiatan Desiminasi Informasi P4GN, Advokasi, dan Pemberdayaan Peran serta masyarakat. Seksi Rehabilitasi melakukan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba. Sedangkan Seksi Pemberantasan belum dapat melakukan Pelaksanaan Penyidikan dan penyelidikan jaringan peredaran gelap narkoba serta pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba karena keterbatasan personil. Sementara itu untuk meningkatkan perhatian seluruh penyelenggara negara terhadap ancaman bahaya

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2020-2024. Melalui Inpres ini menjadi dasar hukum bagi seluruh penyelenggara negara untuk menyusun Rencana Aksi P4GN di lingkungan instansi masing-masing. Untuk hal tersebut, BNN telah memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi baik untuk Instansi Pemerintah Pusat maupun untuk Pemerintah Daerah.

Filosofi penetapan Inpres tersebut adalah perlunya kebersamaan seluruh komponen masyarakat bangsa dan negara melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar permasalahan tersebut dapat segera dituntaskan.

BNN Kabupaten Sumbawa harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat berbagai aspek yang terkait dengan tugas dan fungsinya di Kabupaten Sumbawa. Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten Sumbawa;
- c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNN Kabupaten Sumbawa;
- e. Evaluasi penyusunan laporan BNN Kabupaten Sumbawa;
- f. Pelayanan administrasi BNN Kabupaten Sumbawa;

Lebih jauh lagi, BNN Kabupaten Sumbawa sangat berperan penting dalam melakukan sinergitas antara unit pemberantasan narkoba sehingga pelaksanaan pemberantasan narkoba dapat saling memperkuat dan mempercepat pencapaian target yang diinginkan.

1. Kondisi Geografi, Demografi, SDA dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa

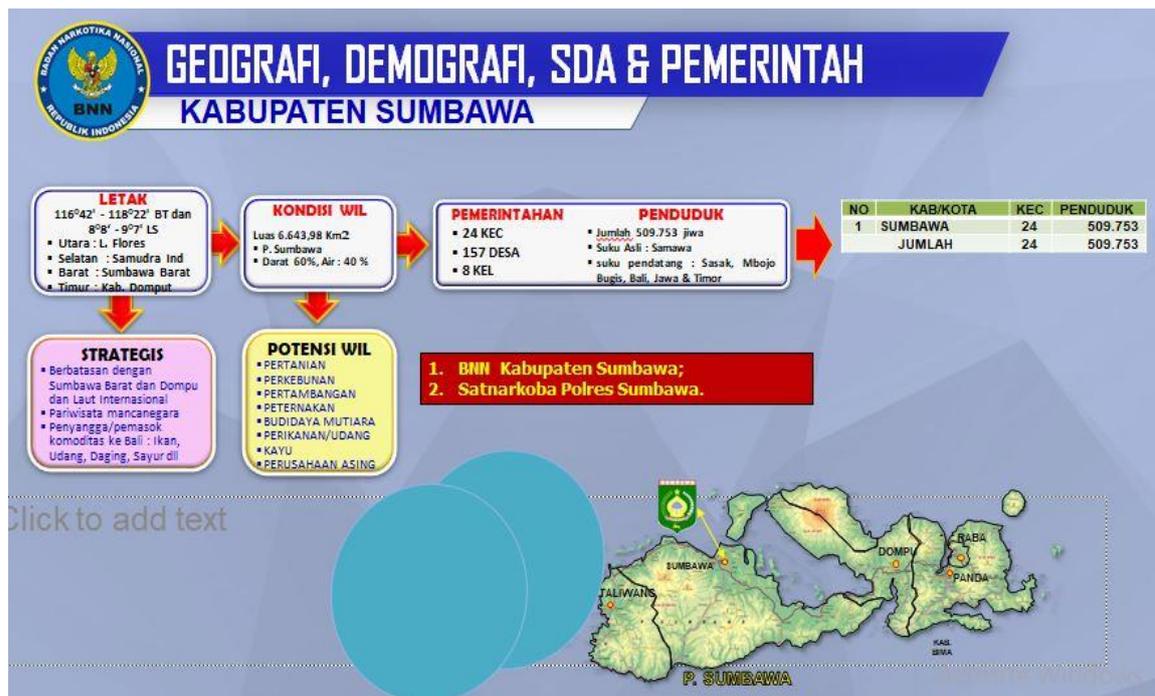
Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah dari sepuluh kabupaten/kota yang berada di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat terletak di ujung barat Pulau Sumbawa, pada posisi 116" 42' sampai dengan 118" 22' Bujur Timur dan 8" 8' sampai dengan 9" 7' Lintang Selatan serta memiliki luas wilayah 6.643,98 Km².

Bila dilihat dari segi topografinya, permukaan tanah di wilayah Kabupaten Sumbawa tidak rata atau cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 1.730 meter di atas permukaan air laut, dimana sebagian besar diantaranya yaitu seluas 355.108 ha atau 41,81 persen berada pada ketinggian 100 hingga 500 meter. Sementara itu ketinggian untuk kota-kota kecamatan di Kabupaten Sumbawa berkisar antara 10 sampai 650 meter di atas permukaan air laut. Ibu kota Kecamatan Batulanteh yaitu Semongkat merupakan ibu kota kecamatan yang tertinggi sedangkan Sumbawa Besar merupakan ibu kota kecamatan yang terendah.

Kabupaten Sumbawa terbagi menjadi 24 kecamatan, 157 desa definitif, 8 kelurahan, dan 657 dusun. Pada tahun 2020, penduduk Kabupaten Sumbawa berjumlah 509.753 jiwa dengan pusat pemerintahan Kabupaten Sumbawa yang berada di Kota Sumbawa Besar.

Komposisi penduduk Kabupaten Sumbawa terbanyak di usia produktif yaitu usia 15 sampai dengan 64 tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan pada tahun 2027 Kabupaten Sumbawa akan mengalami bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar sedangkan proporsi usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun) semakin berkurang.

Komposisi penduduk yang didominasi usia produktif tersebut menambah besar peluang peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sumbawa. Hasil survey BNN pada tahun 2017 menyebutkan bahwa penyalahguna narkoba paling banyak dari orang yang sudah bekerja yaitu mencapai 59%, namun penyalahguna narkoba dari kalangan pelajar juga banyak mencapai 24% dan 17% dari populasi umum.



Gambar 1. Kondisi Geografi, Demografi, SDA dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Kondisi geografi Kabupaten Sumbawa yang memiliki banyak pulau dan menjadi salah satu destinasi pariwisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara, membuat peredaran narkoba di Kabupaten Sumbawa juga cukup banyak dan menjanjikan bagi kalangan pengedar narkoba.

Posisi geografis Kabupaten Sumbawa sangat strategis, dilintasi oleh jalur "Sabuk Selatan Transnasional Banda Aceh-Kupang" merupakan jalur transportasi darat nasional yang terpadat. Kabupaten Sumbawa diapit dua Alur Pelayaran Internasional (API), alur pertama yang melintasi Selat Lombok dan alur kedua yang melintasi Selat Timor. Kabupaten Sumbawa masuk dalam wilayah segi tiga emas tujuan wisata dunia "Bali-Komodo-Tana Toraja". Posisi geografis Kabupaten Sumbawa yang merupakan jalur transportasi darat nasional yang terpadat dan diapit dua Alur Pelayaran Internasional (API), serta masuk dalam wilayah segitiga emas tujuan wisata dunia "Bali-Komodo-Tana Toraja" dan potensi sektor pariwisata yang besar menjadi peluang bagi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sumbawa. BNNP NTB Melalui Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba Tahun 2020, telah memetakan seluruh kelurahan dan desa di NTB, khusus untuk wilayah

Kabupaten Sumbawa dengan jumlah 166 dan menetapkan terdapat 0 daerah Bahaya, 5 daerah Waspada, 78 daerah siaga, serta 83 daerah aman narkotika.

NO	KAB/KOTA	REKAPITULASI DAERAH RAWAN				JUMLAH
		BAHAYA	WASPADA	SIAGA	AMAN	
	KAB. SUMBAWA		5	78	83	166
TOTAL		0	5	78	83	166

Tabel 1. Daerah Rawan dan Rentan Narkotika di Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa merupakan daerah kepulauan memiliki bandara dan banyak pelabuhan, sehingga memungkinkan peredaran narkoba bisa masuk dengan bebas tanpa adanya pengawasan yang ketat di pintu-pintu masuk tersebut. Adapun peta kantong peredaran narkoba di Kabupaten Sumbawa dapat terlihat pada gambar dibawah.



Gambar 2. Peta Kantong Peredaran Narkoba Kabupaten Sumbawa

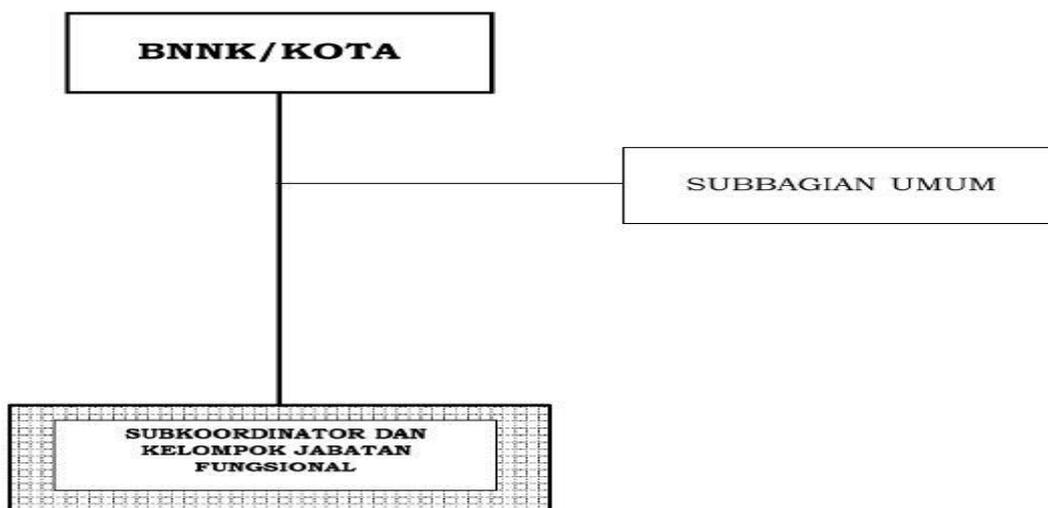
2. Kondisi SDM BNN di Wilayah Kabupaten Sumbawa

Dalam rangka melindungi segenap masyarakat Kabupaten Sumbawa dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, dibentuklah BNN Kabupaten Sumbawa sebagai kepanjangan tangan BNN RI di daerah.

BNN RI membentuk BNN Kabupaten Sumbawa sebagai perwakilan instansi vertikal di daerah pada bulan September tahun 2016.

Adapun struktur organisasi BNN Kabupaten Sumbawa dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 06 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK adalah sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sub Bagian Umum
3. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

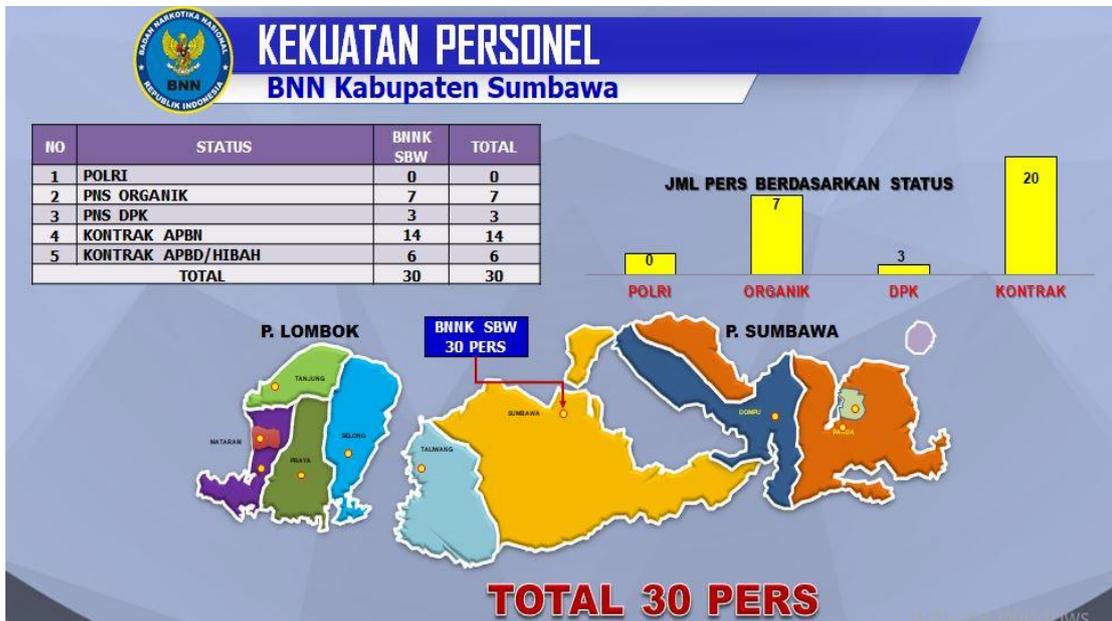


Gambar 3. Struktur Organisasi BNN Kabupaten Sumbawa

BNN Kabupaten Sumbawa didukung oleh berbagai sumber daya manusia yang kompeten didalamnya baik dari unsur PNS organik BNN, PNS Pemda yang diperbantukan (DPK), dan Tenaga Kerja Kontrak. Adapun jumlah keseluruhan SDM BNN Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Sumbawa berjumlah 30 orang.

Jumlah SDM tersebut masih relatif sangat sedikit jika dibandingkan dengan Daftar Susunan Pegawai (DSP) ideal untuk BNN Kabupaten/Kota. Berbagai upaya dilakukan oleh BNN Kabupaten Sumbawa untuk mengatasi kekurangan SDM diantaranya mengajukan permohonan bantuan tenaga PNS

Pemda dan Polisi di Polres Sumbawa, mengoptimalkan SDM yang ada kedalam beberapa tugas sehingga pelayanan P4GN di daerah dapat berjalan secara maksimal.



Gambar 4. Kekuatan Personel BNN Kabupaten Sumbawa

3. Kondisi Sarana Prasarana Perkantoran BNN di Wilayah Kabupaten Sumbawa

BNN Kabupaten Sumbawa merupakan kepanjangan dari BNN RI secara kewilayahan. Wilayah kerjanya mencakup wilayah hukum dan wilayah geografis Kabupaten Sumbawa, BNN Kabupaten Sumbawa resmi menjadi Lembaga Negara yang Vertikal sejak bulan September 2016. BNN Kabupaten Sumbawa saat ini berlokasi di Jl. Garuda No. 23 Sumbawa Besar. Bangunan yang ditempati sebagai Kantor BNN Kabupaten Sumbawa saat ini merupakan Bangunan pinjam pakai milik Pemda Kabupaten Sumbawa sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam upaya P4GN di Kabupaten Sumbawa.

Dalam mendukung salah satu tugasnya yaitu pada pemberantasan penyalahgunaan narkoba, BNN Kabupaten Sumbawa juga dibekali sarana dan prasarana berupa senjata api yang diberikan langsung oleh BNN RI guna menjaga peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Sumbawa. Untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, BNN

Kabupaten Sumbawa juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa mobil sosialisasi dan mobil tes urin keliling yang berisi peralatan penunjang dalam kegiatan sosialisasi bahaya narkoba.

 DATA SARPRAS BNNK SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2021				
NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1.	TANAH			
	a. Untuk Kantor BNNK Sumbawa	1.744 M ²	Tanah Pekarangan	Hibah Bupati Sumbawa
2.	KENDARAAN RODA 2			
	a. Honda Vario 150 MMC	1 Unit	Baik	Pengadaan Dana Hibah 2017
	b. Yamaha Jupiter MX King 150	2 Unit	Baik	Pengadaan BNN RI
	c. Honda Supra GTR 150	2 Unit	Baik	Pengadaan BNN RI
3.	RANMOR RODA 4			
	a. Toyota Avanza Veloz	1 Unit	Baik	Dukungan BNN RI
	b. Astra Mobil Sosialisasi	1 Unit	Baik	Pengadaan Deputi Pencegahan
	c. Isuzu Minibus Tes Urine	1 Unit	Baik	Pengadaan Deputi Pencegahan

Tabel 2. Kondisi Sarpras BNN Kabupaten Sumbawa

4. Kondisi Kasus Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Kabupaten Sumbawa

Sehubungan BNN Kabupaten Sumbawa belum memiliki personil Seksi Pemberantasan, maka untuk Pemberantasan tindak pidana narkoba ditangani oleh Polres Sumbawa dan Sepanjang tahun 2020 Satnarkoba Polres Sumbawa telah mengungkap sebanyak 23 kasus narkoba dengan barang bukti Sabu, 159,58 Gram, Ganja 1,16 Gram dan Ecstasy 5,33 Gram. Berdasarkan seluruh kasus narkoba yang telah diungkap.

DATA TERKAIT KASUS NARKOTIKA TAHUN 2018 S.D 2021 (JAN-MRT)					
NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021 (JAN-MRT)
1.	JUMLAH KASUS	30	50	46	13
2.	JUMLAH TERSANGKA	41	50	65	18
3.	BARANG BUKTI :				
	> SHABU (GR)	144,37	64,37	756,55	-
	> GANJA (GR)	281	10,66	99,13	-
	> EXTACY (BTR)	17	-	-	-
	> TRAMADOL (BTR)	-	185	-	-

Gambar 5. Kondisi Kasus Narkotika yang Ditangani oleh Polres Sumbawa

Capaian kinerja bidang pemberantasan oleh Polres Sumbawa ini berkat dukungan kerjasama dengan masyarakat, penegak hukum lainnya termasuk BNN Kabupaten Sumbawa, dan instansi terkait dalam sharing informasi jaringan narkoba, serta koordinasi dan komunikasi antara unit kerja pusat dan daerah. Peningkatan capaian ini merupakan prestasi yang perlu diapresiasi mengingat permasalahan pengungkapan jaringan merupakan pekerjaan yang sangat sulit, penuh risiko dan tantangan. Meskipun berdasarkan hasil capaian kinerja ini belum mampu mengindikasikan bahwa ancaman sindikat peredaran narkoba menurun, mengingat jaringan sindikat narkoba terus tumbuh dan berkembang.

5. Kondisi Penghuni Lapas Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Kabupaten Sumbawa

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (rutan) di Kabupaten Sumbawa sebanyak 44,35 persen pelaku kriminal di dominasi kasus narkoba. Hal ini menjadi lecutan bagi BNN Kabupaten Sumbawa untuk sigap dan cepat dalam memerangi penyebaran narkoba. Kasus narkoba di Kabupaten Sumbawa semakin marak dan kehadiran BNN

Kabupaten Sumbawa membutuhkan dukungan juga dari berbagai stakeholder, instansi pemerintah, swasta, dan aparat penegak hukum lainnya untuk terus menjalankan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama dengan BNN Kabupaten Sumbawa dan seluruh Forkopimda terus bersinergi dalam memerangi peredaran narkoba. Salah satu upaya yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Sumbawa adalah dengan menerapkan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Dukungan dari Pemerintah daerah sangat diperlukan guna menghasilkan berbagai produk yang terbaik untuk menekan peredaran narkoba di daerah. Instansi pemerintah merupakan elemen penting yang harus memperhatikan kebersihan dari penyebaran narkoba. Sesuai dengan misi NTB Gemilang yakni NTB Bersih dan Melayani.



**DATA TAHANAN DAN NARKOTIKA
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021**

NO.	LAPAS/RUTAN	KAPASITAS	TAHANAN & NAPI	NAPI & TAHANAN NARKOTIKA				
				LAHGUN	PENGEDAR	BANDAR	TAHANAN	TOTAL
NO.	LAPAS KELAS II A SUMBAWA BESAR	250	487	10	170	10	48	238

Tabel 4. Kondisi Penghuni Lapas Kasus Narkotika di wilayah Kabupaten Sumbawa

6. Kondisi Fasilitas Layanan Rehabilitasi Instansi Pemerintah (LRIP) dan Komponen Masyarakat (LRKM) di Wilayah Kabupaten Sumbawa

Fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah maupun kelompok masyarakat yang operasional adalah fasilitas rehabilitasi yang menyelenggarakan fungsi layanan rehabilitasi (rawat inap atau rawat jalan) korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba secara mandiri atau dengan

mendapat dukungan dari instansi pemerintah dan donor lain.

Kabupaten Sumbawa memiliki 3 fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang menyelenggarakan program rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Selain itu Kabupaten Sumbawa juga memiliki 1 fasilitas rehabilitasi yang dikelola oleh masyarakat yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

Hasil survei BNN RI pada tahun 2017 menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi berkelanjutan juga merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Diketahui bahwa dari hasil survei BNN RI pada tahun 2017 menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi berkelanjutan juga merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas pecandu yang telah mengikuti rehabilitasi masih relapse atau menggunakan narkoba kembali.

DATA CAPAIAN YAN REHABILITASI LRIP TAHUN 2018 S.D 2020				
NO	NAMA LEMBAGA	2018	2019	2020
1.	Klinik BNNK Sumbawa	31	41	60
2.	RS Umum Daerah Sumbawa	0	2	0
3.	R S Manambai Abdul Kadir Sumbawa	50	33	0
JUMLAH		81	76	60

Tabel 5. Capaian LRIP di wilayah Kabupaten Sumbawa

DATA CAPAIAN YAN REHABILITASI LRIP KOMPONEN MASYARAKAT TAHUN 2018 S.D 2020				
NO	NAMA LEMBAGA	2018	2019	2020
1.	Rumah Sakit Surya Medika PKU Muhammadiyah	0	7	0

Tabel 6. Capaian LRKM di wilayah Kabupaten Sumbawa

7. Kondisi Capaian dan Evaluasi Kinerja BNN Kabupaten Sumbawa

Permasalahan narkoba di Kabupaten Sumbawa harus ditangani secara serius, mengingat kondisi geografis dan demografis Kabupaten Sumbawa yang mendukung serta peningkatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sumbawa dan Indonesia yang terus meningkat. Sasaran pembangunan nasional dalam penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada upaya penguatan pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi dengan indikator penurunan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba.

BNN Kabupaten Sumbawa menindaklanjuti sasaran pembangunan tersebut melalui beberapa upaya sebagai berikut :

a. Pencegahan

Kegiatan pencegahan dilakukan dengan tujuan untuk menekan sisi membangun kemampuan dan ketahanan diri masyarakat dari pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kegiatan ini dilakukan melalui:

- Mengembangkan sistem pertahanan diri (imunitas) masyarakat secara intensif melalui upaya promotif dan pengembangan kecakapan hidup sejak usia dini.
- Mengembangkan sistem deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, pendidikan, kerja, dan masyarakat.
- Mengoptimalkan peran serta instansi pemerintah, swasta, dan organisasi kemasyarakatan (agama, wanita, pemuda, profesi, dll) dalam kampanye masif anti narkoba.
- Mengembangkan pemberdayaan alternatif di daerah rawan peredaran gelap narkoba

b. Pemberantasan

Kegiatan pemberantasan ditujukan untuk pengungkapan dan penindakan sindikat kejahatan narkoba dengan menghukum berat dan menyita aset hasil kejahatan narkoba. Kegiatan ini dilakukan melalui :

- Memperkuat sistem interdiksi di wilayah jalur-jalur masuk (pelabuhan laut, bandara, dan lintas batas darat).
- Mengungkap jaringan tindak kejahatan narkoba hingga tuntas dan tegas.
- Menyita aset sindikat narkoba yang berasal dari tindak kejahatan narkoba.

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas instansi dan lintas negara dalam rangka pengungkapan sindikat tindak kejahatan narkoba.

Upaya pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan tersebut dilakukan dalam rangka menyeimbangkan penekanan baik sisi *demand* ataupun *supply*. Pada tataran implementasi, kegiatan pencegahan dan pemberantasan tersebut dapat dioptimalkan melalui beberapa strategi berikut:

- **Mendorong Kabupaten Sumbawa untuk menyusun Peraturan Bupati tentang P4GN di daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika mengamanatkan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten / Kota untuk menyusun penyusunan peraturan daerah mengenai P4GN. Pada tahun 2018 tepatnya 26 November 2018, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah mengundang Perda No 19 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. BNNK Sumbawa bersama- sama dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa perlu mendorong agar perda tersebut dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Dengan adanya Perda P4GN di daerah diharapkan dapat mendorong :

- 1) Penyusunan Rencana Aksi P4GN di daerah
- 2) Pembentukan tim terpadu P4GN di tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan.

Sampai dengan saat ini masih banyak Kabupaten / Kota di Kabupaten Sumbawa yang belum menindaklanjuti Permendagri Nomor 12 Tahun 2019. Beberapa daerah masih dalam tahapan penyusunan Perda. Misi Kabupaten Sumbawa keempat yaitu “Sumbawa Aman dan Berbudaya” mewujudkan masyarakat yang beriman, berkarakter, terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum dan terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.

- **Penguatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah memiliki tupoksi penyelenggaraan P4GN di daerah yang berfokus pada upaya pencegahan. Tufoksi ini dijalankan oleh Kantor/ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk itu BNNK Sumbawa perlu meningkatkan kerjasama dengan Kantor/ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

di daerah untuk bersama-sama menekan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Sumbawa.

- **Meningkatkan alternatif pendanaan dari swasta dan masyarakat**

Kampanye anti narkoba bisa disinergikan dengan berbagai kegiatan swasta, baik melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan maupun kampanye perusahaan tersebut untuk meningkatkan *brand awareness* perusahaan, seperti yang sudah mulai banyak dilakukan oleh sejumlah perusahaan.

Berbagai model alternatif pendanaan kampanye anti narkoba dengan menggunakan pendanaan dari swasta dan masyarakat masih perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan baik dengan berbagai komponen swasta yang lain, maupun dengan berbagai variasi model kampanyenya mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah.

- **Mendorong pembentukan rumah edukasi anti narkoba di Kabupaten Sumbawa**

Sebagai bagian dari kampanye gerakan anti narkoba, BNN akan mendorong pembangunan rumah edukasi anti narkoba di Kabupaten Sumbawa dengan menggandeng Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Rumah edukasi gerakan anti Narkoba dapat dipergunakan masyarakat dalam memperoleh informasi yang lengkap mengenai bahaya Narkoba baik tubuh, keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, masyarakat dapat menyelenggarakan aktivitas-aktivitas positif yang inspiratif, pengembangan potensi dan kemampuan, dan menjadi pusat pendidikan karakter.

- **Mendorong pembentukan desa bersinar**

Pembentukan desa bersinar merupakan salah satu amanat dari Inpres No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN dan PN Tahun 2020 – 2024. Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam RPJMD tahun 2020 - 2024 merencanakan pembentukan desa bersinar sebanyak 1 desa setiap tahunnya. BNN bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa perlu mendorong terwujudnya desa bersinar tersebut dan diprioritaskan pada daerah rawan dan rentan narkoba di Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya BNNK Sumbawa dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa perlu mendorong

desa/kelurahan di Kabupaten Sumbawa untuk mengalokasikan anggaran P4GN dalam APBDes-nya serta meningkatkan pendampingan pembentukan desa bersinar. Kabupaten Sumbawa memiliki 165 desa/kelurahan.

- **Inovasi dalam kampanye / sosialisasi anti narkoba**

Kampanye / sosialisasi anti narkoba perlu terus dilakukan inovasi seperti dengan penggunaan media sosial, vlog, lomba poster anti narkoba, cerdas cermat anti narkoba, cipta lagu anti narkoba lomba pembuatan film pendek atau vlog. Inovasi dapat diarahkan kepada pendekatan TIK mengingat jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat.

- **Penguatan peran serta masyarakat**

Salah satu kendala yang dihadapi dalam penanganan masalah narkoba adalah masih rendahnya peran serta masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat adalah melalui pemberdayaan masyarakat, dalam bentuk :

- 1) Pembinaan teknis Pemberdayaan Masyarakat anti Narkoba.
- 2) Bimbingan teknis Pemberdayaan Masyarakat anti Narkoba.
- 3) Pengidentifikasian dan pengembangan potensi sumber daya stakeholder dan masyarakat dalam rangka mendukung P4GN.
- 4) Peningkatan kuantitas dan kualitas penggiat dan relawan anti narkoba. Kabupaten Sumbawa memiliki 153 penggiat dan 250 relawan. Jumlah tersebut masih sangat kurang dibandingkan dengan peningkatan kasus narkoba di NTB.
- 5) Fasilitasi dan dukungan pembinaan masyarakat anti Narkoba.

Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat di BNN Kabupaten Sumbawa mengalami perkembangan yang baik dari tahun ke tahun. Hal tersebut disebabkan karena komitmen masyarakat dan pemerintah daerah yang cukup tinggi dalam penanganan permasalahan narkoba di Kabupaten Sumbawa. Dalam pengukuran Indeks Kemandirian Masyarakat (IKM) tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah, BNNP NTB dan jajaran mendapatkan nilai 3,35 dengan kategorisasi Mandiri. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya Inpres 2 tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Nasional P4GN yang mengharuskan setiap Instansi Lingkungan Pemerintah Menyiapkan Rencana,

Anggaran dan Melaksanakan Inpres Tersebut.

Dalam pengukuran Indeks Kemandirian Masyarakat (IKM) di Lingkungan Masyarakat, BNNP NTB dan jajaran mendapatkan nilai 3,35 dengan kategori Mandiri. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya keaktifan aparatur perangkat desa dan kebijakan pemerintah daerah yang mulai menganggarkan pelaksanaan tes urine kepada warga atau masyarakat.

Dalam pengukuran Indeks Kemandirian Masyarakat (IKM) di Lingkungan Pendidikan, BNNP NTB dan jajaran mendapatkan nilai 3,35 dengan kategori Mandiri. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya Keaktifan Sekolah untuk mengajukan MOU (*Memorandum Of Understanding*) dan Deteksi Dini Melalui Pelaksanaan Tes Urine Di lingkungan Pendidikan. Kemudian pada Lingkungan Swasta, BNNP NTB dan Jajaran Mendapatkan Nilai 3,35 dengan kategori Mandiri. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya keaktifan dan Peran Serta Dunia Usaha dalam Mendukung Program P4GN, Seperti Pelaksanaan Sosialisasi dan Tes urine serta Pengajuan MOU (*Memorandum Of Understanding*) demi menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif dan Produktif.

DATA CAPAIAN DAN HASIL IKP TAHUN 2024											
NO	SATKER	CAPAIAN ADVOKASI LEMBAGA				JUMLAH	HASIL IKP				IKP
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN	
133	6 BNN Kabupaten Badung	1	0	1	0	2	3,93	3,87	0	0	3,90
134	7 BNN Kab Buleleng	1	0	1	0	2	3,35	0	3,64	0	3,50
135	1 BNNP NTB	0	0	1	1	2	0	0	3,4	3,3	3,35
136	2 BNNK Sumbawa Barat	0	0	1	1	2	0	0	3,57	3,52	3,55
137	3 BNNK Sumbawa	1	0	1	0	2	3,33	0	3,74	0	3,54
138	4 BNNK Mataram	1	0	0	1	2	3,92	0	0	3,84	3,88
139	5 BNNK Bima	1	0	1	0	2	3,74	0	3,8	0	3,77

Tabel 7. Indeks Kemandirian Masyarakat (IKM) di wilayah Provinsi NTB

Sumber : LKIP BNNP NTB Tahun 2024

Siklus selanjutnya dalam penanganan permasalahan narkoba adalah rehabilitasi penyalah guna dan atau korban penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam hal ini BNN Kabupaten Sumbawa mendapatkan mandat khusus untuk melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi disamping juga dapat menyelenggarakan layanan rehabilitasi itu sendiri.

BNN Kabupaten Sumbawa berupaya melakukan penguatan kepada lembaga rehabilitasi baik pemerintah maupun komponen masyarakat dengan berbagai pendekatan. Diantaranya upaya pemetaan, monitoring dan evaluasi perkembangan lembaga rehabilitasi. Bimbingan teknis dan pelatihan tenaga rehabilitasi juga terus dilakukan guna meningkatkan kualitas peyanan lembaga rehabilitasi kepada masyarakat.

Meskipun secara kuantitatif upaya penguatan lembaga rehabilitasi telah meningkat namun dari sudut pandang kinerja kelembagaan menunjukkan bahwa upaya penguatan lembaga rehabilitasi masih belum optimal dan perlu ditingkatkan.

Capaian kinerja BNN Kabupaten Sumbawa secara keseluruhan atas arah kebijakan dan srategi dalam Renstra BNN RI Tahun 2015-2019 menunjukkan hasil yang baik. Begitu pula aspirasi masyarakat yang ditunjukkan dalam hasil survei atas pelayanan BNN Kabupaten Sumbawa kepada stakeholders menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, walaupun ada beberapa hal yang diharapkan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

Berdasarkan analisa kondisi lingkungan strategis terkait berbagai permasalahan narkoba di wilayah provinsi, terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal organisasi BNN Kabupaten Sumbawa yang dapat dikelola dan dioptimalisasi. Berbagai potensi tersebut adalah:

- a. Meningkatnya komitmen dan keberpihakan bersama dalam menempatkan dan memperlakukan kejahatan narkoba sebagai isu kejahatan nasional dan internasional;
- b. adanya perjanjian kerja sama antar instansi pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat di daerah;

- c. perspektif penanganan masalah dalam kejahatan narkoba semakin mengarah pada upaya integrasi dan kolaborasi melalui pelibatan banyak instansi penegak hukum.

2. Permasalahan

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Kabupaten Sumbawa, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

a. Problematika pengawasan peredaran.

Lebih lanjut, isu strategis problematika pengawasan peredaran narkoba dapat diinventarisir sebagai berikut:

- 1) Lemahnya pengawasan kejahatan narkoba di lembaga masyarakat.
- 2) Lemahnya pengawasan peredaran gelap narkoba pada jalur tidak resmi.
- 3) Banyaknya jalur lintas batas tidak resmi sebagai pintu keluar masuk antar pulau.
- 4) Keterbatasan kewenangan BNN Kabupaten Sumbawa di wilayah perbatasan.

b. Rendahnya daya dukung eksternal masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Problematika pengawasan peredaran diperparah oleh rendahnya daya dukung eksternal dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang antara lain:

- 1) Lemahnya perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana narkoba.
- 2) Daya tarik nilai ekonomi narkoba yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkoba walaupun risiko hukum yang sangat tinggi.
- 3) Kurang dimanfaatkannya nilai dan budaya masyarakat lokal untuk

mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba.

4) Sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung menutupi adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sekitar dan atau keluarganya karena adanya perasaan malu dan takut.

5) Minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan dukungan sumber daya anggaran dan lainnya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

c. Belum optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan.

Perlunya optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- 1) Masih banyak pecandu narkoba yang relaps setelah menjalani program rehabilitasi dan kembali menggunakan narkoba. Bahkan terjadi peralihan penggunaan jenis narkoba dari satu jenis ke jenis narkoba lainnya oleh kalangan pecandu narkoba.
- 2) Sebaran dan ketersediaan lembaga rehabilitasi yang masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan assessment penyalah guna narkoba di wilayah yang tidak tersedia lembaga rehabilitasi.
- 3) Kesepahaman kalangan aparat penegak hukum dalam penerapan hukuman rehabilitasi terhadap penyalah guna da-tau pecandu narkoba yang masih rendah sehingga upaya penyelamatan penyalah guna da-tau pecandu narkoba melalui rehabilitasi belum maksimal.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

A. TUJUAN ORGANISASI

Tujuan Organisasi BNN Kabupaten Sumbawa sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020-2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan.

Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.

2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas.

Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi. Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Kabupaten Sumbawa

sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

Kebijakan dan strategi operasional BNN Kabupaten Sumbawa merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

1. penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Kabupaten Sumbawa juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Permasalahan narkoba di Kabupaten Sumbawa harus ditangani secara serius, mengingat kondisi geografis dan demografis Kabupaten Sumbawa yang mendukung serta peningkatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di NTB dan Indonesia yang terus meningkat. Sasaran pembangunan nasional dalam penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada upaya penguatan pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi dengan indikator penurunan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba.

Penanganan permasalahan narkoba di Indonesia menjadi salah satu fokus pembangunan negara oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam statemennya di salah satu pidato kenegaraan, Bapak Presiden menyampaikan bahwa “Indonesia berada dalam situasi darurat Narkotika”.

Extraordinary Crime

Presiden RI Joko Widodo

pada tahun 2015 menyatakan bahwa

"Indonesia berada dalam situasi darurat Narkotika."



Pada Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2021, Presiden RI melalui Wakil Presiden RI

"Mari kita mulai dari masyarakat desa yang memiliki kekuatan besar dalam melawan Narkotika secara bersama-sama. Dibutuhkan desa yang kondusif dan aman untuk membesarkan anak (*It Takes a Village to Raise a Child*), karena anak-anak adalah masa depan bangsa."

Gambar 6. Statement Presiden dan Wakil Presiden RI

Kejahatan Narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan extraordinary crime yang merupakan kejahatan terorganisir lintas negara atau internasional dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Sehingga kita perlu melakukan perlawanan terhadap salah satu kejahatan luar biasa yang menjadi tantangan negara-negara di dunia termasuk Indonesia.

Dalam penanganan kejahatan narkotika di Kabupaten Sumbawa kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Kabupaten Sumbawa sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

1. peningkatan pengawasan titik masuk jalur peredaran dan kapasitas kerjasama pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
2. peningkatan kapasitas dan kualitas pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;

3. peningkatan pemberdayaan, partisipasi dan daya tanggap masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba;
4. peningkatan fasilitas rehabilitasi yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup penyalah guna, pecandu da-tau korban penyalahgunaan narkoba;
5. penguatan jaringan kerjasama kelembagaan, hukum, inovasi dan teknologi;
6. penataan dan penguatan kelembagaan untuk memperbaiki tata kelola dan kualitas pelayanan publik BNN Kabupaten Sumbawa.

BAB III

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

A. RENCANA KINERJA

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa menetapkan rencana kinerja sesuai dengan konstruksi struktur kinerja BNN periode 2020-2024. Desain rencana kinerja BNN Kabupaten Sumbawa menggunakan pendekatan cascading kinerja sebagai penjabaran dari sejumlah kinerja kegiatan yang dimandatkan BNN RI ke unit kerja BNN Provinsi.

Rencana kinerja yang disusun BNN Kabupaten Sumbawa selama periode 2020-2024 telah sesuai dengan Rencana Strategis BNN RI tahun 2020-2024 dan Visi Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam rangka mewujudkan “NTB Gemilang” serta Misi yang keenam yaitu “NTB Aman dan Berkah” melalui salah satu program Desa Bersih Narkoba. Berbagai kegiatan yang akan dilakukan BNN Kabupaten Sumbawa dalam rencana kinerja periode 2020-2024 antara lain :

1. Pencegahan

Bidang Pencegahan BNN Kabupaten Sumbawa memiliki tugas meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tugas tersebut antara lain :

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi (*Program Prioritas Nasional*)

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Rencana kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Sumbawa pada periode tahun 2020-2024 antara lain :

- a.1. Informasi dan Edukasi Melalui Pemanfaatan Media Luar Ruang
- a.2. Informasi dan Edukasi Melalui Media Online
- a.3. Informasi dan Edukasi Melalui Kampanye / Pagelaran Seni
- a.4. Informasi dan Edukasi Melalui Placement (Penayangan) Televisi Daerah

- a.5. Informasi dan Edukasi Melalui Branding pada Sarana Publik
- a.6. Informasi dan Edukasi Melalui Placement Radio lokal/daerah
- a.7. Pelatihan Softskill di SMP dan SMU sederajat

b. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi (*Program Prioritas Nasional*)

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan yaitu meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Sumbawa memiliki tugas meningkatkan ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tugas tersebut antara lain :

a. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat (*Program Prioritas Nasional*)

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan melalui pemberian pelatihan kerja sesuai minat dan kebutuhan masyarakat di suatu kawasan atau wilayah.

3. Pemberantasan Narkotika

Bidang pemberantasan BNN Kabupaten Sumbawa memiliki tugas meningkatkan pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkotika. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan BNN Kabupaten Sumbawa dalam melakukan penindakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain :

a. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

b. Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap dan Peredaran Gelap Narkotika

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika.

c. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika.

d. Kegiatan Asesmen Terpadu (TAT)

Kegiatan ini memiliki sasaran untuk memberikan rekomendasi rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan pidana. Asesmen Terpadu merupakan mekanisme yang dibentuk berdasarkan peraturan bersama guna menempatkan pecandu dan penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis atau sosial. Rehabilitasi merupakan salah satu cara guna menekan angka permintaan narkotika (demand reduction) yang akan berimplikasi pada penurunan angka peredaran gelap narkotika di Indonesia.

4. Rehabilitasi Pecandu Narkotika

Seksi rehabilitasi BNN Kabupaten Sumbawa memiliki tugas meningkatkan upaya pemulihan pecandu narkotika melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tugas tersebut antara lain :

a. Kegiatan Pengembangan Fasilitas Rehabilitasi

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika. Pengembangan fasilitas rehabilitasi dilakukan melalui program bimbingan teknis dan asistensi fasilitas rehabilitasi di wilayah kabupaten Sumbawa.

b. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Tenaga Rehabilitasi

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya kapasitas tenaga rehabilitasi. Peningkatan kapasitas kepada tenaga rehabilitasi dilakukan melalui pemberian pelatihan serta sertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi. BNN Kabupaten Sumbawa juga mendorong masyarakat melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) untuk menjadi agen pemulihan BNN dalam upaya mendorong korban

penyalahgunaan narkoba yang ada di desa atau wilayahnya untuk lapor diri ke BNN agar mendapatkan rehabilitasi.

c. Kegiatan Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pengolahan data dalam rangka pembinaan lanjut, bimbingan teknis dan monitoring evaluasi pelaksanaan layanan rehabilitasi

d. Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN. Pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkoba dilakukan dengan berbagai program, antara lain : pendampingan pemulihan, layanan rehabilitasi rawat jalan, dan monitoring evaluasi fasilitas rehabilitasi.

e. Pelaksanaan Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) atas penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya penerimaan negara bukan pajak dari pendapatan atas penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba yang dikeluarkan oleh masyarakat yang membutuhkan surat keterangan untuk keperluan sekolah atau masuk kerja.

Terkait penetapan rencana target kinerja BNN Kabupaten Sumbawa rencana target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Kabupaten Sumbawa merupakan gambaran dan proyeksi rencana target kinerja pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah kabupaten.

Adapun rencana target kinerja BNN Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024 disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kinerja.

B. RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN

Rencana kebutuhan pendanaan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BNNK Sumbawa baik di seksi pencegahan dan pemberdayaan, pemberantasan dan rehabilitasi. Selain itu, rencana kebutuhan pendanaan juga untuk mendukung operasional rutin perkantoran.

Adapun rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN di Kabupaten Sumbawa tahun 2020-2024 secara detail disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kebutuhan pendanaan.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNN Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024 merupakan dokumen penjabaran rencana strategis BNN 2020-2024.

Renproja BNN Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2024. Renproja BNN Kabupaten Sumbawa yang dirumuskan untuk periode 2020-2024 mengusung Visi: “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat Kabupaten Sumbawa dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas.

Adapun sasaran strategis untuk pencapaian tujuan tersebut diarahkan pada: (1) Menurunnya Penyalahgunaan dan Terkendalinya Peredaran Gelap Narkoba, (2) Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi.

Dalam dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNN Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024 telah menggambarkan desain rencana program kerja dan struktur kinerja BNN Kabupaten Sumbawa secara hirarkis sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan.

Lampiran
Matrik Rencana Kinerja
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkotika	-	50	51	51	52
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkotika	-	78,67	78,80	78,80	83,125
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi	2	3,42	3,20	3,25	3,49
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	-	-	-	60	68
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara Layanan IBM yang terlatih	-	-	-	5	10

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	2	1	1	1
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	1	1	1	2	2
8.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	-	3,20	3,20	3,30	3,29
9.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88	90	91	92	87
10.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	-	94	95	92	97,41

*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada BNN Kabupaten Sumbawa

Lampiran
Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	120.000.000	74.720.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	48.000.000	44.450.000	40.000.000	40.000.000	106.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi	128.324.000	214.512.000	221.400.000	216.570.000	216.570.000
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	-	-	-	-	14.665.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara Layanan IBM yang terlatih	61.595.000	12.380.000	12.550.000	11.400.000	153.709.000
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	-	-	52.950.000	75.467.500	6.545.000
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	-	-	52.950.000	75.467.500	96.530.000
8.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	-	-	-	-	11.040.000
9.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	29.000.000	58.000.000	55.266.000	47.712.000	20.278.000
10.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	130.404.000	145.717.000	136.094.000	131.626.000	1.006.595.000

Lampiran
Matrik Output dan Rencana Komponen/Sub Komponen
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa
Tahun 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>	Pengembangan Softskill di SMP dan SMU sederajat
			Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	Monitoring Wilayah
2.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan diri keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkotika	Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkotika
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkotika	Pembinaan Teknis
				Pemetaan Kelompok Sasaran di Instansi Pemerintah, Lingkungan Swasta, Lingkungan Masyarakat, dan Lingkungan Pendidikan
				Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkotika di Instansi Pemerintah, Lingkungan Swasta, Lingkungan Masyarakat, dan Lingkungan Pendidikan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
				Monev Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Instansi Pemerintah, Lingkungan Swasta, Lingkungan Masyarakat, dan Lingkungan Pendidikan
4.	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	Pembinaan Teknis Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba
				Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba
				Monev Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
5.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara Layanan IBM yang terlatih	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	Peningkatan Kompetensi Teknis Petugas Rehabilitasi
				Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi
				Monitoring Petugas Rehabilitasi
			Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis	Sertifikasi Petugas Rehabilitasi
6.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	Lembaga rehabilitasi yang operasional	Pembinaan Teknis
				Bimbingan Teknis dan Asistensi Fasilitas Rehabilitasi
				Koordinasi Kelembagaan
			Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Layanan Klinik Pratama
			Monitoring Fasilitas Rehabilitasi	
				Pengolahan Data Dalam Rangka Pembinaan Lanjut

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
7.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk dan operasional	Pemetaan dan Koordinasi
				Pembentukan Unit IBM
				Supervisi dan Asistensi
				Operasional Unit IBM
8.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	Kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	Pemetaan dan Koordinasi
				Supervisi dan Asistensi
9.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja
				Koordinasi Penyusunan RKA
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi
				Koordinasi Penyusunan Laporan
10.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Layanan Manajemen Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan
				Monitoring dan Evaluasi
			Layanan Perkantoran	Pembayaran Gaji dan Tunjangan
				Operasional Perkantoran

